

## UPAYA ETHIOPIA DAN ERITREA DALAM NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK PADA MASA KEPEMIMPINAN ABIY AHMED ALI TAHUN 2018-2021

Kartini Ayu Lestari<sup>1</sup>

**Abstract:** Ethiopia and Eritrea are two countries in the Horn of Africa which from 1998 to 2018 did not have active diplomatic relations as a result of border conflicts involved the two countries. After two decades, in 2018, the two countries made a peace agreement and made efforts to normalize their diplomatic relations. Efforts made by the Ethiopian and Eritrean government included ending the border conflict and normalizing diplomatic relations between the two countries, reopening embassies in each country's national capital, withdrawing each military forces from border areas, opening Ethiopia – Eritrea border for the first time in 20 years, as well as awarded a new land in 2019 from the Government of Ethiopia to the Government of Eritrea to build a new Eritrean embassy in Ethiopia.

**Keywords:** Effort, Diplomatic Relations, Ethiopia, Eritrea, Normalization, Abiy Ahmed Ali.

### Pendahuluan

Ethiopia dan Eritrea merupakan dua negara bertetangga yang terletak di wilayah Tanduk Afrika (*The Horn of Africa*). Keduanya merupakan dua negara dari Afrika yang pernah dikuasai oleh Koloni Italia. Kekuasaan Koloni Italia di Eritrea dimulai dari tahun 1890-an dan di Ethiopia pada tahun 1936, dan ketika Perang Dunia ke-2 berlangsung di mana Italia mengalami kekalahan setelah Ethiopia mendapatkan bantuan dari pasukan tentara Inggris.

Adapun kekalahan dari pihak Italia di wilayah Ethiopia juga berdampak terhadap kekuasaannya di Eritrea. Pasukan Inggris yang sebelumnya telah membantu pasukan Ethiopia untuk mengambil alih kembali wilayahnya, juga membantu rakyat Eritrea untuk lepas dari kekuasaan Koloni Italia. Pada 10 Februari 1947, Italia akhirnya melepaskan haknya atas wilayah Eritrea. Setelahnya, status mengenai wilayah Eritrea diputuskan dalam resolusi no. 390 tahun 1950 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana Eritrea bergabung dengan Ethiopia sebagai federasi di bawah kedaulatan Kekaisaran Ethiopia. Selama persiapan resolusi PBB, untuk sementara Eritrea berada di bawah administrasi Inggris sebagai suatu negeri perwakilan PBB. Hal ini berlaku sampai resolusi tersebut diresmikan pada tahun 1952 (Negash, 1997: 59).

Di tahun 1959, Ethiopia membatalkan perjanjian dalam resolusi tahun 1952 mengenai status Eritrea dan mengubah nama pemerintah Eritrea menjadi Administrasi Eritrea. Hukum Ethiopia pun kemudian diberlakukan secara penuh di Eritrea. Selain itu Eritrea dilarang membentuk partai politik, tidak adanya kebebasan pers, serta bahasa Eritrea tidak boleh lagi diajarkan di sekolah. Pada tanggal 14 November 1962, Kaisar Haile Selassie yang merupakan kaisar Ethiopia pada saat itu, mengeluarkan Order nomor 27 yang mengatakan periode federal Eritrea berakhir, secara sepihak menganeksasi Eritrea dan menjadikannya provinsi ke-14 Ethiopia (Keller, 1991: 153).

Periode perang kemerdekaan Eritrea kemudian berlangsung dari September 1961 hingga Mei 1991. Pihak Eritrea dengan *Eritrean Peoples Liberation Front* (EPLF) mendapat dukungan dari negara-negara Arab serta gerilyawan Palestina dan juga Somalia yang simpati akan gerakan pembebasan Eritrea. Sedangkan Ethiopia dibantu secara finansial dan peralatan militer oleh Uni Soviet dan Kuba. Setelah runtuhnya Uni Soviet,

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : kartiniayulestari@gmail.com

PBB melakukan intervensi dan mengadakan referendum pada tahun 1991 mengenai status Eritrea.

Berdasarkan hasil pemungutan suara dari berbagai wilayah Eritrea, dan beberapa wilayah di Afrika lainnya seperti Sudan dan Ethiopia serta pasukan perjuangan, total 99,79% memutuskan memilih Eritrea untuk menjadi negara independen dan berdaulat. Hasil dari referendum tersebut adalah adanya kedaulatan dan pengakuan penuh atas wilayah ([Department of External Affairs Eritrea, 1993: 110](#)) Eritrea pada tanggal 24 Mei 1993 dengan Asmara ditunjuk sebagai ibukota negara Eritrea dengan Isaias Afwerki terpilih sebagai Presiden Eritrea mewakili EPLF yang kemudian menjadi partai politik legal Eritrea dengan nama *People's Front for Democracy and Justice* (PFDJ).

Setelah Eritrea resmi merdeka, Ethiopia dan Eritrea mulai mempraktikkan hubungan baik dengan menjadi mitra dekat pada tahun 1993 hingga 1995. Namun hubungan baik kedua negara tidak berlangsung lama. Ketegangan atas kebijakan ekonomi dan sengketa perbatasan menyebabkan hubungan kedua negara tidak membaik dan akhirnya menimbulkan konflik. Hubungan pasca-pemisahan antara kedua negara yang tidak ditangani dengan baik pada saat pemisahan diri menyebabkan munculnya masalah-masalah lain yang kemudian memperburuk hubungan kedua negara.

Beberapa masalah yang dihadapi baik dari Ethiopia maupun Eritrea berupa penetapan biaya pelabuhan yang berlebihan; manipulasi nilai tukar diikuti dengan pengenalan Nakfa, mata uang Eritrea; penyalahgunaan terus menerus kargo ke dan dari Eritrea, terutama di sepanjang rute Assab; dan perilisan peta Ethiopia pada Oktober 1997, yang menegaskan kembali garis perbatasan, membuat keadaan memuncak ketika Eritrea mengirim pasukannya melintasi perbatasan bersama di daerah bernama Badme yang menyebabkan krisis pada 6 Mei 1998.

Pada 12 Desember tahun 2000 kedua negara sepakat menandatangani Perjanjian Aljir di mana secara singkat isi dari perjanjian tersebut yakni; mengakhiri perang secara permanen dan menahan diri dari penggunaan kekuatan militer, menghormati dan mengimplementasikan seluruh ketentuan dalam perjanjian, membebaskan dan memulangkan semua tawanan perang dan semua orang tahanan, serta memperlakukan secara manusiawi warga negara satu sama lain dan orang-orang dari negara asal masing-masing di wilayah masing-masing.

Meski dengan adanya Perjanjian Aljir yang di mana salah satunya menetapkan ketentuan batas wilayah antara kedua negara, penolakan atas ketentuan batas wilayah tersebut terus datang dari pemerintah Ethiopia. Hingga akhirnya konflik antara Ethiopia dan Eritrea tidak menemukan titik akhir selama dua dekade (1998-2018). Konflik kedua negara tersebut baru berakhir pada tahun 2018 setelah pemerintah Ethiopia menunjuk perdana menteri barunya yakni Abiy Ahmed Ali dan dimulailah upaya normalisasi hubungan antara Ethiopia dan Eritrea.

## Landasan Konseptual

### *Multi-Track Diplomacy*

*Multi-Track Diplomacy* adalah konsep diplomasi yang menjelaskan mengenai proses terjadinya perdamaian dunia dalam sistem internasional melalui perpaduan dari diplomasi jalur pemerintah, diplomasi jalur kelompok, dan diplomasi jalur individu ([Diamond dan McDonald, 1996: 1](#)). *Multi-Track Diplomacy* terkait dengan perdamaian ialah mengambil pendekatan sistem untuk memahami sifat internasional peacebuilding secara struktural. Kegiatan struktur sistem perilaku dan tindakan lembaga untuk mendukung perwujudan atau pelaksanaan perdamaian, dan hal tersebut dengan membangun ekonomi, militer, dan infrastruktur masyarakat yang memberikan kekuatan dan realistik melalui sistem perdamaian ([Notter dan Diamond, 1996: 4](#)).

Konsep *multi-track diplomacy* terdiri dari sembilan jalur diplomasi di mana merupakan gabungan dari berbagai aktor diplomasi lainnya guna mencapai perdamaian dunia yang dikembangkan oleh Louise Diamond dan John McDonald bertujuan untuk memaksimalkan proses dari pelaksanaan diplomasi. Adapun sembilan jalur tersebut yaitu (1) *Government* (Pemerintah), (2) *Non-government/Professional* (Non pemerintah atau aktor profesional), (3) *Business* (Bisnis), (4) *Private Citizen* (Masyarakat sipil), (5) *Research, Training, and Education* (Penelitian, Pelatihan, dan Edukasi), (6) *Activism* (Aktivis), (7) *Religion* (Agama), (8) *Funding* (Pendanaan), (9) *Communication and the Media* (Komunikasi dan media) (Diamond dan McDonald, 1996: 4).

Dalam penelitian ini indikator *multi-track diplomacy* yang digunakan adalah *diplomacy track one "Government"* (Pemerintah). Diplomasi pemerintah adalah proses tindakan *peacebuilding* maupun *peacemaking* antar negara pada tingkat pemerintah yang berusaha untuk membentuk, mengelola dan meningkatkan sistem hubungan internasional, kepercayaan, keyakinan, mediasi, krisis intervensi, resolusi konflik, bahkan untuk mencegah kekerasan dan mengamankan kepentingan nasional negara seperti ekonomi, perdagangan, politik, hak asasi manusia, ilmu pengetahuan, budaya, dan etnis atau kelompok politik dalam sistem global (Diamond dan McDonald, 1996: 26).

Jalur pemerintah memiliki ciri-ciri, pertama, pemerintah sebagai badan resmi yang mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab dalam perdamaian. Diplomasi merupakan sarana aktivitas dalam perwujudan perdamaian di tingkat pemerintah sebab membutuhkan pemahaman yang baik antar negara agar mampu melakukan negosiasi atau menghadapi krisis dan konflik.

Kedua, pemerintah mempunyai kuasa dalam menciptakan perdamaian terutama dalam kasus yang bersifat politik tingkat tinggi sebab dalam merumuskan kebijakan diperlukan adanya kekuasaan. Asumsi dasar diplomasi internasional yakni adanya kekuasaan relatif di mana kekuatan politik suatu negara mampu mengontrol sumber daya, mengintervensi bahkan memengaruhi negara lain (Diamond dan McDonald, 1996: 26).

Maka dalam proses tersebut posisi pemerintah merupakan pembawa kekuatan. Negara yang memiliki pemerintah kuat mampu mengontrol negara yang lemah, dalam artian negara harus bisa mengontrol kekuatannya agar dapat mampu mencapai tujuan nasionalnya. Sehingga dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki peran resmi dalam mewujudkan perdamaian. Pemerintah sebagai pelaksana dalam melakukan diplomasi, di mana pelaksanaan dan pengambilan keputusannya dilakukan secara resmi dan formal atas nama negara. Diplomasi dalam jalur ini tidak hanya dilakukan oleh presiden, tetapi juga dapat dilakukan oleh diplomat, duta besar dan kelompok serta individu yang ditunjuk oleh negara.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menjelaskan upaya Ethiopia dan Eritrea dalam normalisasi hubungan diplomatik pada masa kepemimpinan Abiy Ahmed Ali Tahun 2018 – 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan telaah pustaka (*library research*) yang bersumber dari berbagai referensi buku, *e-book*, jurnal hingga situs internet.

## Hasil dan Pembahasan

Sejak perang antara Ethiopia dan Eritrea yang berlangsung dari tahun 1998 hingga tahun 2000, berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan konflik di antara kedua negara. Seperti adanya pembentukan pasukan penjaga perdamaian oleh PBB yang dikenal dengan nama UNMEE, membuat resolusi mengenai perbatasan melalui sidang arbitrase yang dilakukan oleh EEBC, hingga sampai kepada penandatanganan Perjanjian Aljir oleh Ethiopia dan Eritrea pada 12 Desember 2000.

Meski perang antara kedua negara telah berakhir, nyatanya konflik antara kedua negara terutama terhadap status batas wilayah masih terjadi di antara Ethiopia dan Eritrea. Hal ini kemudian menciptakan kondisi “tidak perang, tidak damai” di antara kedua negara selama dua dekade. Konflik antara kedua baru berakhir pada tahun 2018 di mana saat itu Ethiopia telah memilih Perdana Menteri barunya yaitu Abiy Ahmed Ali, dan upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Ethiopia dan Eritrea dimulai.

### A. Upaya Ethiopia dan Eritrea dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik Kedua Negara

Selama 20 tahun konflik antara kedua negara berlangsung, memasuki pertengahan tahun 2018 Ethiopia dan Eritrea akhirnya sepakat untuk mengakhiri konflik serta melakukan upaya guna menormalisasikan hubungan diplomatik kedua negara. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Kesepakatan Damai dalam Mengakhiri Konflik dan Normalisasi Hubungan antara Ethiopia dan Eritrea

5 Juni 2018, melalui Komite Eksekutif EPRDF yang dipimpin oleh Abiy Ahmed Ali, menyatakan bahwa pemerintah Ethiopia siap untuk menerima dan mengimplementasikan secara penuh tanpa syarat keputusan mengenai status perbatasan pada 13 April 2002 oleh EEBC yang didirikan di bawah naungan pengadilan arbitrase yang sesuai dalam Perjanjian Aljir 2000. Keputusan Pemerintah Ethiopia di bawah pimpinan Abiy Ahmed Ali sendiri tidak datang dalam waktu sehari. Ada beberapa yang mendasari Pemerintah Ethiopia pada akhirnya siap dalam menerima dan mengimplementasikan keputusan EEBC serta memulai inisiasi perdamaian dengan Eritrea.

Pertama adalah ketika melemahnya pengaruh TPLF selama hampir tiga dekade yang berujung pada krisis politik dan perekonomian sejak tahun 2015 di Ethiopia, membawa kondisi negara tersebut berada diambang peperangan sipil. Kedua adanya tuntutan reformasi dari rakyat Ethiopia setelah Abiy Ahmed Ali terpilih sebagai Perdana Menteri baru khususnya dalam memperbaiki perpolitikan dan perekonomian Ethiopia. Rezim Abiy Ahmed Ali melihat bahwa hal tersebut tidak dapat tercapai selama hubungan antara Ethiopia dan Eritrea tidak dinormalisasi. Hal ini yang kemudian menjadi awal mulai Ethiopia untuk berdamai dengan Eritrea. Keputusan tersebut juga sebagai bentuk undangan kepada pemerintah Eritrea untuk memulai perdamaian dan mengakhiri keadaan “*no peace, no war*” yang dialami oleh Ethiopia dengan Eritrea akibat konflik sengketa perbatasan (Bereketeab, 2019: 14).

Setelah dua minggu pernyataan dari pemerintah Ethiopia, pada 20 Juni 2018 bertepatan dengan Hari Martir, pemerintah Eritrea menyambut baik hal tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Eritrea, Isaias Afwerki menyampaikan pemerintah Eritrea akan mengirimkan delegasinya ke Addis Ababa, Ethiopia, untuk mendiskusikan secara langsung serta menindaklanjuti kelanjutan rencana perdamaian ([washingtonpost.com](https://www.washingtonpost.com), 2018).

Pengiriman delegasi Eritrea ke Ethiopia tersebut merupakan yang pertama sejak 20 tahun yang lalu ketika konflik perbatasan kedua negara pecah pada tahun 1998.

Selanjutnya pada 26 Juni 2018, pemerintah Eritrea mengirimkan Menteri Luar Negerinya, Osman Saleh Muhammed, untuk mengunjungi Ethiopia. Selama kunjungan 3 hari di Addis Ababa, dalam pertemuan bilateral pertama sejak dua dekade konflik tersebut kedua negara sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan melakukan pertukaran duta besar.

Dialog perdamaian dan normalisasi hubungan kedua negara akhirnya sampai dengan adanya kesepakatan damai yang diinisiasikan oleh pemerintah Ethiopia melalui *joint declaration of peace and friendship*. Pada tanggal 8 Juli 2018 Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali melakukan kunjungan ke ibukota Eritrea, Asmara, yang langsung disambut oleh Presiden Isaias Afwerki. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama sejak dua dekade yang dilakukan oleh pemimpin Ethiopia. Dalam kunjungannya tersebut, Abiy Ahmed Ali menyampaikan niat pemerintah Ethiopia untuk mengakhiri konflik perbatasan dan juga membangun kembali hubungan kedua negara yang terputus selama 20 tahun.

Pada 9 Juli 2018, sehari setelah pertemuan pertama di Asmara berlangsung, Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali bersama dengan Presiden Isaias Afwerki melakukan penandatanganan *Joint Declaration of Peace and Friendship* sebagai penanda berakhirnya konflik antara kedua negara. *Joint declaration* yang ditandatangani tersebut berisikan 5 poin, yaitu (1) Keadaan dan situasi perang antara Ethiopia dan Eritrea telah berakhir, (2) Kedua negara akan membangun kerja sama politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga keamanan serta pembukaan kedutaan besar di masing-masing ibu kota, (3) Membangun kembali hubungan diplomatik, perdagangan, komunikasi dan transportasi, (4) Keputusan mengenai batas antara kedua negara akan dilaksanakan, (5) Kedua negara akan bersama-sama berusaha untuk menjamin perdamaian, pembangunan serta kerja sama regional ([Ministry of Information Eritrea, 2018](#)).

## **2. Pembukaan Kedutaan Besar Ethiopia dan Eritrea di Masing-Masing Ibu Kota Negara**

Menyambut baik hasil dari *joint declaration* yang diinisiasikan oleh Ethiopia, Presiden Eritrea Isaias Afwerki pun membalas dengan melakukan kunjungan ke Ethiopia pada 14-16 Juli 2018 yang mana kehadirannya disambut dengan baik dan meriah oleh rakyat Ethiopia. Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Isaias Afwerki ke Ethiopia juga menjadi kunjungan pertama setelah 20 tahun konflik antara kedua negara berlangsung. Kunjungan ini juga sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam menormalisasikan hubungan diplomatik keduanya.

Dalam kunjungan tersebut Presiden Isaias Afwerki dan Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali bersama-sama melakukan upacara pembukaan kembali kedutaan besar Eritrea di Ethiopia. Pembukaan kedutaan besar Eritrea di Ethiopia merupakan respon lanjutan atas keberhasilannya kesepakatan damai yang terjadi seminggu sebelumnya di Asmara, Eritrea sekaligus sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam menormalisasi hubungan diplomatik yang sempat terputus selama dua dekade dari tahun 1998 hingga 2018.

Bersama dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali, Presiden Eritrea Isaias Afwerki dan delegasi Eritrea memasuki gedung kedutaan besar Eritrea yang baru kembali dibuka tersebut. Di dalam gedung tersebut, terlihat bagaimana bagian dalam dan juga barang-barang yang berada di dalam kedutaan besar tersebut tertutup penuh dengan debu, menandakan kedutaan besar tersebut tidak dihuni selama 20 tahun lamanya.

Melanjuti dengan dibukanya kedutaan besar Eritrea di Addis Ababa, pada 21 Juli 2018 Eritrea telah menunjuk duta besar pertamanya untuk negara Ethiopia setelah dua dekade. Tugas duta besar tersebut diberikan kepada Semere Russom yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan Eritrea dan mantan duta besar Eritrea untuk Amerika Serikat ([aljazeera.com, 2018](#)). Sebelumnya di pekan yang sama, pada 19 Juli 2018 Ethiopia telah menunjuk Redwan Hussein sebagai duta besar Ethiopia untuk Eritrea, meski kedutaan

besar Ethiopia di Eritrea baru resmi dibuka kembali pada September 2018.

Hal yang sama kemudian terjadi di Eritrea, di mana saat Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali melakukan kunjungan keduanya pada 6 September 2018 dalam rangka pembukaan kembali kedutaan besar Ethiopia di Eritrea. Dalam kunjungannya tersebut Abiy Ahmed Ali menyampaikan bahwa lokasi kedutaan besar Ethiopia di Eritrea memiliki lokasi yang strategis dan berterima kasih kepada Pemerintah Eritrea yang telah melakukan renovasi sebagai bentuk dalam menunjukkan bahwa Pemerintah Eritrea menghargai kerja sama dengan Ethiopia ([aa.com.tr, 2018](#)).

### **3. Penarikan Masing-Masing Pasukan Militer di Wilayah Perbatasan dan Pembukaan Perbatasan Ethiopia-Eritrea Setelah 20 Tahun**

Setelah adanya penandatanganan *joint declaration* oleh Ethiopia dan Eritrea pada 9 Juli 2018, dua bulan setelah penandatanganan kesepakatan damai yang dilakukan oleh Ethiopia dan Eritrea dalam mengakhiri konflik, dengan segera kedua negara melakukan pemulihan hubungan diplomatik. Adapun seperti yang dijelaskan sebelumnya, tindakan pertama yang dilakukan oleh kedua negara yakni sama-sama membuka kembali kedutaan besar masing-masing di Ethiopia dan Eritrea. Dengan adanya pembukaan kembali kedutaan besar kedua negara, menjadi penanda bahwa Ethiopia dan Eritrea telah berkomitmen untuk menstabilkan hubungan kedua negara baik dalam tingkat regional maupun internasional.

Adapun langkah lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Eritrea yakni menarik pasukan militernya pada tanggal 20 Juli 2018 di perbatasan yang dijaga baik dari pasukan militer Eritrea maupun Ethiopia. Langkah tersebut adalah isyarat rekonsiliasi yang disepakati kedua negara dalam melanjutkan normalisasi hubungan kedua negara. Penarikan pasukan militer yang dilakukan Pemerintah Eritrea merupakan langkah konsisten dalam menindaklanjuti perkembangan pasca pemulihan hubungan diplomatik di antara kedua negara.

Sebagai bentuk keseriusan kedua negara telah berdamai, pada 11 September 2018, bertepatan dengan perayaan nasional tahun baru Ethiopia, Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali dan Presiden Isaias Afwerki melakukan kunjungan ke sisi Eritrea dari perbatasan Bure, yang berdekatan dengan pelabuhan Assab untuk merayakan perayaan nasional tahun baru Ethiopia bersama pasukan pertahanan Ethiopia dan Eritrea yang berada di garis depan perbatasan ([tesfanews.net, 2018](#)).

Dalam kunjungan tersebut kedua pemimpin negara juga membuka dua pos pemeriksaan perbatasan. Yang pertama yakni perbatasan Debay Sima-Bure, di mana perbatasan tersebut menghubungkan pelabuhan Assab di Eritrea dan ibukota Ethiopia, Addis Ababa. Pembukaan tersebut disertai dengan perbaikan jalan untuk mempermudah akses lalu lintas kedua negara. Rute selanjutnya yang dibuka adalah perbatasan Serha-Zalambessa yang menghubungkan ibukota Eritrea dengan daerah Tigray dan ibukota serta selatan Ethiopia ([Bereketeab, 2019: 15](#)). Pembukaan kedua rute tersebut merupakan pelaksanaan lanjutan dari implementasi *Joint Declaration of Peace and Friendship* kedua negara yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memperlancar perpindahan barang, jasa dan masyarakat.

Pembukaan rute di kedua perbatasan Ethiopia dan Eritrea menjadi bagian yang sangat penting bagi kedua negara, sebab lokasi tersebut memiliki populasi tinggi dan dengan adanya pembukaan pos pemeriksaan tersebut menjadi kelegaan tersendiri bagi penduduk yang tinggal di perbatasan. Selain itu fakta bahwa masyarakat yang tinggal di kedua sisi perbatasan memiliki hubungan darah yang terpisahkan oleh konflik 20 tahun, akhirnya dapat bertemu dan melakukan kontak kembali dengan keluarga mereka ([Bereketeab, 2019: 15](#)).

Menindaklanjuti komitmen Ethiopia dalam kesepakatan damai bersama Eritrea, pada 17 Desember 2018 Pemerintah Ethiopia memulai menarik pasukannya dari

wilayah perebutan perbatasan negara. Penarikan pasukan tersebut selalu menjadi tuntutan utama dari Pemerintah Eritrea bahkan sebelum kesepakatan damai terjadi ([theeastafrican.co.ke](http://theeastafrican.co.ke), 2018). Meski penarikan mundur pasukan tersebut baru terlaksana pada Desember 2018, setidaknya hal tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah Ethiopia dalam memenuhi perjanjian damai yang ditandatanganinya.

## **B. Perkembangan Hubungan Ethiopia dan Eritrea Setelah Normalisasi Hubungan Kedua Negara**

### **1. Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali Mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian**

Setahun sudah Ethiopia dan Eritrea menormalisasikan hubungan diplomatik keduanya setelah melakukan penandatanganan perjanjian damai di ibukota Asmara, Eritrea. Dampak dari perjanjian damai tersebut sudah dirasakan oleh kedua negara, begitu pula dengan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali yang ikut berperan dalam mengakhiri konflik dua dekade antara Ethiopia dan Eritrea.

Atas perannya tersebut sebagai Perdana Menteri dan mewakili Pemerintah Ethiopia, pada Oktober 2019, Abiy Ahmed Ali dianugerahi Nobel Perdamaian atas jasanya dalam mengakhiri konflik perbatasan antara Ethiopia dan Eritrea. Selain atas jasanya dalam mengakhiri konflik perbatasan Ethiopia dan Eritrea, Abiy Ahmed Ali juga berkontribusi dalam membebaskan ribuan aktivis oposisi dari tahanan dan mengizinkan para pemberontak yang telah diasingkan untuk kembali ke rumah mereka. Adapun di bawah kepemimpinannya, Abiy Ahmed Ali juga telah memberikan posisi penting kepada para wanita di dalam kabinet Pemerintah Ethiopia ([bbc.com](http://bbc.com), 2019).

### **2. Eritrea Mendapatkan Lahan untuk Membangun Gedung Kedutaan Baru di Ethiopia**

Memasuki akhir tahun 2019, tepatnya pada 26 Desember 2019, Ethiopia telah menghadiahkan lahan kepada Pemerintah Eritrea untuk membangun gedung Kedutaan Besar Eritrea yang baru di Addis Ababa, Ethiopia. Presiden Eritrea, Isaias Afwerki yang didampingi oleh Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, sama-sama melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Kedutaan Besar Eritrea yang baru di Siddist Kilo di ibu kota Addis Ababa ([africanews.com](http://africanews.com), 2019).

Dalam kesempatan tersebut, Abiy Ahmed Ali menyampaikan bahwa pemberian lahan tersebut merupakan hadiah natal yang diberikan oleh pemerintah dan rakyat Ethiopia kepada pemerintah dan rakyat Eritrea. Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan kedua negara yang telah dinormalisasikan pada tahun 2018, sesaat setelah kedua negara sepakat untuk mengakhiri konflik di antara keduanya.

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Isaias Afwerki bersama delegasi dari Eritrea, ia menyatakan rasa terima kasih kepada pihak pemerintah dan rakyat Ethiopia yang telah menyambut para delegasi resmi dari Eritrea dengan baik dan menyatakan bahwa Eritrea siap untuk terus membuka peluang kerjasama yang telah terputus selama dua dekade dengan Ethiopia guna meningkatkan hubungan di antara kedua negara ([Ministry of Information Eritrea](http://Ministry of Information Eritrea), 2019).

Selain itu, Presiden Isaias Afwerki dan delegasi Eritrea dalam kunjungan kenegaraan resminya yang didampingi oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali, juga melakukan kunjungan ke beberapa proyek pembangunan di Ethiopia termasuk Adama Industrial Park, Holand Diary, proyek pengindahana Sheger, dan observatorium dan pusat penelitian Entoto.

### 3. Hubungan Ethiopia dan Eritrea di Tahun 2020 – 2021

Memasuki tahun 2020, dua tahun setelah Ethiopia dan Eritrea resmi menyatakan damai, kedua negara terus berkomitmen untuk melanjutkan hubungan bilateral. Tantangan pun juga harus dihadapi oleh kedua negara ketika dunia dilanda oleh penyebaran virus Covid-19 ([hrw.org](http://hrw.org), 2020). Akibat dari cepatnya penyebaran virus, memaksa Ethiopia menutup perbatasan antara Eritrea dengan Ethiopia. Meski demikian, hubungan kedua negara tetap berlanjut di mana pada 3 Mei 2020, Presiden Eritrea, Isaias Afwerki bersama dengan delegasinya mengunjungi Ethiopia. Selama kunjungan diplomatik yang berlangsung tiga hari tersebut, Isaias Afwerki dan Abiy Ahmed Ali mendiskusikan kerja sama bilateral dan masalah regional yang memengaruhi kedua negara, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19 dan serangan hama belalang gurun, yang menjadi ancaman regional kawasan Afrika ([aa.com.tr](http://aa.com.tr), 2020).

Presiden Isaias Afwerki, Menteri Luar Negeri Osman Saleh Muhammed dan Penasihat Presiden Yemane Ghebreab yang ditemani oleh Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali juga melakukan kunjungan ke beberapa proyek pengembangan pertanian dan air seperti, Universitas Jimma, Hachalu Civic Center, perkebunan kopi, dan investasi di wilayah Oromia serta pembangkit listrik tenaga air Gibe 3 dan 4 di wilayah Selatan ([Ministry of Information Eritrea](http://Ministry of Information Eritrea), 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa kedua negara terus berkomitmen dalam meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama dalam lingkup regional.

Meski hubungan diplomatik kedua negara telah membaik, sayangnya memasuki akhir tahun 2020 hingga sepanjang 2021, Ethiopia harus dihadapkan pada perang saudara dengan salah satu partai yang sempat berkuasa di Ethiopia yakni TPLF. Pemerintah Ethiopia menuduh bahwa TPLF telah melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer yang berada di wilayah utara Tigray, Ethiopia. Wilayah utara Tigray sendiri juga merupakan salah satu wilayah di mana kamp pengungsi dari Eritrea berada.

Militer Eritrea sendiri telah terlibat dalam konflik di wilayah Tigray, Ethiopia sejak konflik pecah pada November 2020 dengan mengirimkan ribuan tentara untuk mendukung pasukan federal Ethiopia dalam melawan TPLF. Keterlibatan Eritrea sendiri memiliki implikasi yang lebih luas, sebab ini menjadi salah satu cara pemerintah Eritrea dalam menegaskan posisinya di kawasan regional setelah hubungan diplomatik kedua negara membaik.

Akibat dari konflik tersebut, banyak warga Ethiopia dan para pengungsi dari Eritrea menjadi korban. Lima bulan setelah pasukan militer Eritrea memasuki wilayah Tigray dalam membantu pasukan federal Ethiopia, pada Maret 2021 Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali mengkonfirmasi bahwa Eritrea akan segera menarik pasukannya dari wilayah Tigray setelah kedua pihak mendapat kecaman atas tindakannya dalam konflik tersebut yang telah menarik perhatian pihak internasional dan kelompok HAM. Meski adanya keterlibatan Eritrea dalam konflik perang saudara di Ethiopia, hal tersebut tidak mengganggu hubungan diplomatik di antara kedua negara.

### Kesimpulan

Upaya Ethiopia dan Eritrea dalam normalisasi hubungan diplomatik dapat terlaksanakan dengan efektif berkat adanya kontribusi diplomasi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Ethiopia dan Pemerintah Eritrea sebagai aktor utamanya. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam sebuah diplomasi sebab pemerintah memiliki peran resmi dan mempunyai kekuatan dalam menciptakan perdamaian melalui negosiasi serta dalam menghadapi krisis maupun konflik.

Ketika Abiy Ahmed Ali ditunjuk sebagai Perdana Menteri baru Ethiopia pada tahun 2018, kebijakan pertama yang diambil oleh Pemerintah Ethiopia adalah menerima dan siap mengimplementasikan hasil keputusan EEBC tahun 2002 mengenai perbatasan yang



disengketakan oleh Ethiopia-Eritrea, yakni Badme. Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Ethiopia siap untuk mengakhiri konflik dua dekade yang terjadi dengan Eritrea. Pemerintah Eritrea tentunya juga melihat tindakan Pemerintah Eritrea tersebut sebagai kesempatan bagi kedua negara untuk mencapai perdamaian.

Hal ini kemudian berlanjut dengan inisiasi kesepakatan damai oleh Pemerintah Ethiopia dalam mengakhiri konflik dengan Eritrea untuk selamanya serta menormalisasikan hubungan kedua negara. Inisiasi kesepakatan damai tersebut tertuang dalam *Joint Declaration of Peace and Friendship* yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed Ali dan Presiden Eritrea Isaias Afwerki pada 8-9 Juli 2018.

Selain menandatangani kesepakatan damai, upaya yang selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Ethiopia dan Pemerintah Eritrea yaitu: membuka kedutaan besar Ethiopia dan Eritrea di masing-masing ibu kota negara; menarik masing-masing pasukan militer di wilayah perbatasan kedua negara serta membuka perbatasan Ethiopia – Eritrea setelah 20 tahun. Setelah normalisasi hubungan kedua negara di tahun 2018 tercapai, hubungan kedua negara mengalami perkembangan dalam beberapa tahun. Seperti dilakukannya kunjungan resmi kenegaraan oleh masing-masing pemimpin dan delegasi kedua negara.

Adapun di akhir tahun 2019, bertepatan dengan perayaan Natal, Pemerintah Ethiopia secara khusus menghadihkan lahan baru kepada pemerintah Eritrea guna membangun gedung Kedutaan Besar Baru Eritrea. Hubungan Ethiopia dan Eritrea pun juga terus berlanjut, di mana tahun 2020 kedua pemimpin negara saling melakukan kunjungan kenegaraan dalam mendiskusikan kerja sama bilateral dan masalah regional di kawasan Afrika. Berakhirnya konflik antara kedua negara serta tercapainya normalisasi hubungan diplomatik Ethiopia – Eritrea, telah membawa Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali meraih Nobel Perdamaian pada tahun 2019.

### Daftar Referensi

- Negash, T. 1997. *Eritrea and Ethiopia The Federal Experience*. Transaction Publishers.
- Keller, Edmond J. 1991. *Revolutionary Ethiopia: From Empire to People's Republic*. Bloomington. Indiana University Press.
- Department of External Affairs Eritrea. 1993. *Eritrea: Birth of Nation*. Asmara. Government of Eritrea.
- Diamond, Louise and John McDonald. 1996. *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace – Third edition*. United States of America. Kumarian Press.
- Notter, James and Louise Diamond. 1996. *Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice*. Occasional Paper Number 7. The Institute For Multi Track Diplomacy.
- Bereketeab, Redie. 2019. *The Ethiopia-Eritrea Rapprochment: Peace and Stability in the Horn of Africa*. Policy Dialogue No. 13. The Nordic Africa Institute.
- Schemm, Paul. Eritrea breaks silence and responds to Ethiopia peace overtures, will send delegation. tersedia di [https://www.washingtonpost.com/world/africa/eritrea-breaks-silence-and-responds-to-ethiopia-peace-overtures-will-send-delegation/2018/06/20/80c84c5c-745f-11e8-b4b7-308400242c2e\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/africa/eritrea-breaks-silence-and-responds-to-ethiopia-peace-overtures-will-send-delegation/2018/06/20/80c84c5c-745f-11e8-b4b7-308400242c2e_story.html)
- Ministry of Information Eritrea. Joint Declaration of Peace and Friendship. tersedia di <https://shabait.com/2018/07/09/joint-declaration-of-peace-and-friendship-between-eritrea-and-ethiopia/>
- Aljazeera. Eritrea appoints first ambassador to Ethiopia in 20 years. tersedia di <https://www.aljazeera.com/news/2018/7/21/eritrea-appoints-first-ambassador-to-ethiopia-in-20-years>
- Getachew, Addis. Ethiopia reopens embassy in Eritrea. tersedia di <https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopia-reopens-embassy-in-eritrea/1247600>

- TesfaNews. Eritrea, Ethiopia Troops Celebrate Peace and New Year Together. tersedia di <https://www.tesfanews.net/eritrea-ethiopia-troops-celebrate-peace-and-new-year-together/>
- The East African. Ethiopia withdraws troops from Eritrea border. tersedia di <https://www.theeastafrican.co.ke/tea/news/rest-of-africa/ethiopia-withdraws-troops-from-eritrea-border-1408676>
- BBC. Nobel Peace Prize: Ethiopia PM Abiy Ahmed wins. tersedia di <https://www.bbc.com/news/world-africa-50013273>
- AfricaNews. Merry Christmas!: Ethiopia gifts Eritrea a new embassy building. tersedia di <https://www.africanews.com/2019/12/26/merry-christmas-ethiopia-gifts-eritrea-a-new-embassy-building/>
- Ministry of Information Eritrea. Presiden Isaias and PM Dr. Abiy laid foundation of Eritrean Embassy. tersedia di <https://shabait.com/amp/2019/12/26/president-isaias-and-pm-dr-abiy-laid-foundation-of-eritrean-embassy/>
- Human Right Watch. World Report 2021: Eritrea. tersedia di <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/eritrea>
- World Africa. Eritrean president on visit to Ethiopia. tersedia di <https://www.aa.com.tr/en/africa/eritrean-president-on-visit-to-ethiopia/1827463>
- Ministry of Information Eritrea. President Isaias Afwerki carries out a three-day working visit to Ethiopia. tersedia di <https://shabait.com/2020/10/12/president-isaias-afwerki-carries-out-a-three-day-working-visit-to-ethiopia/>